



RENCANA KERJA BIRO HUKUM TAHUN 2026

**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAMBI
2025**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	6
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Biro Hukum	6
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	8
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	14
D. Review Terhadap RKPD	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BIRO HUKUM	
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
B. Tujuan dan Sasaran (spesifik, teratur, dapat dicapai dan waktu) tujuan yang ingin dicapai	
1. Tujuan	24
2. Sasaran	25
3. Strategi (konseptual, analitis, realistis, rasional & komprehensif)	25
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	27
BAB V PENUTUP	31
LAMPIRAN.....	
Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Renstra 2021-2026 LPPK Bulan Desember 2024 Evaluasi Renja Triwulan Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja sebagai bagian integral dalam implementasi Rencana Strategis tertuang dalam penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan strategis dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana kerja kegiatan tersebut merupakan suatu jabaran program yang memiliki kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah, lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai, tujuan, sasaran Biro Hukum.

Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah merupakan penjabaran Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2025 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan dalam periode Tahun 2026. Renja Biro Hukum tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan selama tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadi perubahan kegiatan atau program karena adanya kebijakan dari pemerintah.

Biro Hukum sebagai salah satu unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Tugas Biro Hukum sesuai dengan Perda Nomor 18 Tahun 2016, *“Biro Hukum mempunyai tugas membantu sekretariat daerah dalam rangka penyiapan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang penyusunan perundang-undangan dan pembinaan kebijakan daerah, bantuan hukum serta penegakan hak azazi manusia dan dokumentasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Dan mempunyai Fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dan penegakan hak azazi manusia;
- b. pelaksanaan pelayanan dokumentasi bidang perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, bantuan, serta penegakan hak azazi manusia serta pembinaan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan kegiatan tata usaha biro; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan

melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2025-2029.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2026 dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Hukum yang memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka pendek Biro Hukum pada tahun 2026. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum, penyelesaian permasalahan hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Tujuan.

Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan tujuan memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Karena itu Renja 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat hasil-hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mencapai indikator-indikator yang ditetapkan seperti yang tercantum di dalam Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029.

Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 akan berfungsi sebagai:

- (1) Pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026;

- (2) Pedoman dalam menyusun Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS) Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026; dan
- (3) Pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.

2. Sistematika Penulisan.

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan menguraikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

BAB V PENUTUP

Menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Biro Hukum

Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, pada tahun 2024 Biro Hukum melaksanakan 2 Program, 6 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja Biro Hukum telah baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja masing-masing kegiatan cukup baik, capaian kinerja sampai indikator Hasil (Outcomes) dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1
Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 x 100%)
1	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan Peraturan	1. Persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih	100%	100%	100%

	Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.	tinggi			
		2. Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100%
		3. Persentase Produk Hukum daerah yang dapat diakses publik	100%	100%	100%
		4. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	5. Prediket SAKIP	B	BB	100%
		6. Nilai IKM	80	87,32	100%

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2024 berjalan dengan baik. Seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan pencapaian sasaran kinerja 91,05%. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 1.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis pencapaian Akuntabilitas Kinerja dengan cara pengukuran kinerja dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah Provinsi Jambi yang diarahkan pada indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, dan sasaran kinerja kegiatan. Sebagai gambaran indikator kinerja Biro Hukum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama (Eselon II)
Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.	1. Persentase produk hukum provinsi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%
		2. Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%
		3. Persentase Produk Hukum Provinsi yang dapat diakses publik	100%
		4. Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang difasilitasi	100%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	5. Prediket AKIP	Prediket BB
		6. Nilai IKM	Indeks 80

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Biro Hukum tidak terlepas dari adanya tujuan pembangunan di bidang hukum yang ingin dicapai dengan melaksanakan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari Produk Hukum daerah baik Provinsi Jambi maupun kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi dan terciptanya kesesuaian antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tabel 3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.	1. Persentase produk hukum provinsi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%
		2. Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%
		3. Persentase Produk Hukum Provinsi yang dapat diakses publik	100%	100%
		4. Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang difasilitasi	100%	100%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	5. Prediket AKIP	Prediket BB	Prediket BB
		6. Nilai IKM	Indeks 80	Indeks 87,32

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, Biro Hukum mendapatkan jumlah dukungan dana sebesar Rp. 2.057.654.669,- (Dua Milyar Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.873.525.350,- atau 91,05 % sebagaimana tercatat pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) terlampir.

Realisasi program dan kegiatan tersebut di atas dapat terlaksana sesuai sasaran antara lain disebabkan oleh

perencanaan program dan kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

Namun masih ada kendala dan permasalahan yang dihadapi sebagai beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagai Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SKPD adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap tugas dan fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam bidang perancang perundang-undangan.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas baik dari segi keuangan maupun secara fisik, semua program dan kegiatan hampir seluruhnya dapat dilaksanakan dan mencapai target, namun diakui juga di dalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala/hambatan dan permasalahan.

Sesuai dengan hasil analisa capaian kinerja tahun 2024 maka dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dituangkan berdasarkan program pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum, disertai langkah-langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan review dan telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, sehingga dapat dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja untuk tahun berikutnya, yaitu sebagai berikut :

1. *Pemahaman SKPD pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.*

Setiap SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memprakarsai terciptanya produk hukum daerah. SKPD tersebut selayaknya telah memahami teknis penyusunan produk hukum daerah yang akan diciptakannya. Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum sering menemukan kesalahan yang terjadi berulang-ulang dalam teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh SKPD, Keadaan tersebut menyebabkan Biro Hukum tidak dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan secara efisien.

Biro Hukum dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan selayaknya lebih memfokuskan kepada sinkronisasi dan harmonisasi substansi dari produk hukum daerah yang diprakarsai oleh SKPD terkait terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan kepada teknis penyusunan produk hukum daerah.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Biro Hukum dalam menangani permasalahan tersebut di atas adalah dengan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan SKPD di Provinsi, Melalui penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut diharapkan Biro Hukum dapat memberikan informasi mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah sehingga SKPD terkait tidak lagi melakukan kesalahan berulang-ulang mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah.

2. *Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara/permasalahan hukum bagi apatur yang menangani perkara/kuasa hukum.*

Guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparaturnya yang menangani masalah hukum khususnya aparaturnya pengelola hukum/kuasa hukum perlu terus-menerus diberikan pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan dalam beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara dihadapan pengadilan, sehingga aparaturnya yang mendapatkan pengetahuan tersebut dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan secara adil. Pengetahuan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dalam menghadapi sidang pengadilan, dimana Pemerintah Daerah sering digugat oleh perseorangan atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. *Masih kurangnya pemahaman SKPD sebagai pemrakarsa produk hukum daerah Kabupaten/Kota terhadap prosedur serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.*

Dalam hal pembentukan produk hukum seharusnya aparat perancang produk hukum memahami teknis penyusunan produk hukum yang akan ditetapkan, namun sering ditemukan kesalahan yang berulang dalam teknis penulisan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh SKPD. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada SKPD yang akan menyusun produk hukum, karena prosedur penyusunan produk hukum telah ada dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. *Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta SDM dalam pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)*

Pengoperasian Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya SDM sebagai pengelola dan bertugas mengadministrasi JDIH. Di sisi lain, dalam pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana utama yang sedang dibangun dan dikembangkan pada tahun 2016 dalam pengelolaannya masih terbatas. Untuk itu Biro Hukum mengharapkan tersedianya SDM pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta sarana yang kondusif, guna menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses produk hukum daerah dan nasional melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

D. Review Terhadap RKPD

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi termasuk dalam salah satu pelaksanaan penunjang pembangunan Provinsi Jambi terutama dalam menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi pada Tahun 2026 yang juga diharapkan dapat berlanjut pada Tahun 2027, dengan menyesuaikan anggaran tahun 2025 dan alokasi anggaran pada Renstra Biro Hukum Tahun 2025-2029 maka Biro Hukum telah merencanakan pagu dana indikatif

kegiatan yang berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jambi dengan total anggaran yang direncanakan pada tahun 2026 sebesar **Rp. 1.889.500.000** (*satu milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupaiah*) dan prakiraan maju tahun 2027 ini yaitu sebesar **Rp. 2.028.450.000,-** (*dua milyar dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh rupiah*).

Lebih lanjut mengenai gambaran keperluan dana/pagu indikatif, sumber pendanaan pada Renja 2026 dan perkiraan target maju tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel Rencana Program dan Kegiatan Biro Hukum 2026 dan Prakiraan Maju Tahun terlampir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BIRO HUKUM

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional diantaranya :

1. Peningkatan kualitas manajemen ASN
2. Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah.
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi lebih diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi lebih diarahkan pada difokuskan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan turunan dari kebijakan pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat Provinsi Jambi. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Kemudian, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2025 – 2045 juga menjadi rujukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan keberpihakan kepada daerah tertinggal dan penduduk miskin.

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mempunyai tugas dan fungsi yang cukup penting di dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi, sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mengambil peran pada terlaksananya Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mewujudkan arah dan kebijakan pembangunan Daerah Provinsi Jambi pada Misi Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dengan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi harus mampu menciptakan regulasi/kebijakan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah guna terciptanya pelayanan yang bersih, transparan dan akuntabel. Fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah untuk melaksanakan:

1. Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan masyarakat serta mengakomodir kebutuhan daerah.
2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Tujuan dan Sasaran (spesifik, teratur, dapat dicapai dan waktu) tujuan yang ingin dicapai

1. Tujuan

Bertolak dari Visi dan Misi Gubernur Jambi, maka untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mempunyai tujuan **“Terwujudnya penataan produk hukum daerah”**, dengan sasaran program sebagai berikut :

- a. Meletakkan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Provinsi Otonom yang mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan penataan produk hukum daerah.

- b. Terlaksananya penyelesaian masalah hukum kepada yang berhubungan dengan pelaksanaan roda pemerintahan serta meningkatnya kualitas, profesionalitas aparatur dibagian bantuan hukum dalam pelaksanaan penyelesaian hukum di lingkungan pemerintahan daerah.
- c. Terlaksananya penyusunan Rencana Aksi HAM dalam rangka menyinergikan upaya perlindungan HAM yang dilakukan oleh pemerintah daerah **provinsi** dan kabupaten/kota, mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan yang sesuai prinsip-prinsip **HAM**, dan mengoptimalkan pencapaian pemenuhan hak kepada kelompok sasaran.

2. Sasaran

Untuk mencapai hasil secara nyata oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dalam rumusan yang lebih spesifik dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, maka yang menjadi sasaran Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah: **Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.**

- a. Terwujudnya produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.
- b. terselesaikannya permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah dengan pemberian pendampingan hukum secara terpadu dan terorganisasi dengan kemampuan aparatur yang berprofesional dan berkualitas.
- c. Tercapainya Aksi HAM Pemerintah daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

3. Strategi (konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif)

Sesuai dengan kondisi internal dan eksternal, untuk pelaksanaan tugas Biro Hukum, maka dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Biro Hukum menerapkan strategi kerjasama. Pola kerjasama yang dilaksanakan mencakup vertikal, horizontal dan bottom up. Kerjasama dimaksud mencakup sumber daya aparatur dan keuangan dengan lembaga terkait dalam bidang Hukum.

Rencana kinerja adalah kumpulan kegiatan yang sistematik dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun Program Rencana Kinerja yang akan ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah Program dan kegiatan yang diprioritaskan.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, telah disusun langkah-langkah kebijakan untuk tahun 2026 antara lain :

1. Meningkatkan Supremasi Hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai media komunikasi dan Telekomunikasi elektronik yang memuat produk hukum daerah.
3. Menyusun dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengkaji dan mengevaluasi produk hukum Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kebijakan tahun 2026 pada dasarnya hanya melanjutkan rencana kinerja seperti pada tahun sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan jika di tengah-tengah pelaksanaan anggaran kinerja terdapat inisiatif baru atas dasar kebijakan dari kepala daerah yang harus segera ditindaklanjuti dengan cara menetapkan indikator kinerja baru. Implementasi yang tertuang dalam rencana kerja tahun 2026 mencakup 2 Program, 5 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Indikator kinerja, keluaran sasaran dan capaian renstra SKPD program dan kegiatan dalam rencana kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2026 sesuai dengan rencana strategik Biro Hukum Setda Provinsi Jambi 2025 - 2029 serta pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi beserta bagian-bagian pendukung yang terintegrasi di dalamnya.

1. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum

Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan

Sub Kegiatan: Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan

Sub Kegiatan: Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan

Sub Kegiatan: Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya

Sub Kegiatan: Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Sub Kegiatan: Fasilitas penyelesaian Masalah Hukum

Sub Kegiatan: Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2026 dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategik Sekretariat Daerah Provinsi Jambi 2025-2029 serta pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi beserta bagian-bagian pendukung yang terintegrasi di dalamnya.

Lebih jauh bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam suatu upaya pencapaian kinerja hendaknya dapat dilaksanakan secara arif untuk diselesaikan dan menjadi suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan **good governance** dan **clean government** yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian Rencana Kerja Program dan Kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2026 ini kami sampaikan, dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategik Biro Hukum Setda Provinsi Jambi 2025-2029.

Akhirnya, semoga Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya pada Tahun 2026 ini dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

Jambi, September 2025

Plt. KEPALA BIRO HUKUM



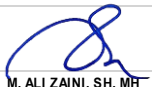
M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 196902081993032004

LAMPIRAN

TABEL RENSTRA BIRO HUKUM PROVINSI JAMBI

PERIODE 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Data Baseline (2025)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						K	Rp	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		K	Rp		
								[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]				
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel				Indek Reformasi Birokrasi	BB Prediket		BB Prediket		BB Prediket		BB Prediket		BB Prediket		BB Prediket		BB Prediket		Biro Hukum	Provinsi Jambi
	Meningkatnya Kualitas implementasi Akuntabilitas Kinerja	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		PREDIKAT AKIP	BB Prediket	366.854.669	BB Prediket	389.500.000	BB Prediket	428.450.000	BB Prediket	471.295.000	BB Prediket	518.424.500	BB Prediket	570.266.950	A Prediket	2.844.976.600		
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 Indeks		89,25 Indeks		89,5 Indeks		90 Indeks		90,25 Indeks		90,5 Indeks		90,5 Indeks			
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	75 Nilai	34.000.000	77 Nilai	34.000.000	78 Nilai	37.400.000	79 Nilai	41.140.000	80 Nilai	45.254.000	81 Nilai	49.779.400	81 Nilai	674.613.550		
		01	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	5.000.000	4 Dok	5.000.000	4 Dok	5.500.000	4 Dok	6.050.000	4 Dok	6.655.000	4 Dok	7.320.500	4 Dok	30.525.500		
		02	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dok	5.000.000	2 Dok	5.000.000	2 Dok	5.500.000	2 Dok	6.050.000	2 Dok	6.655.000	2 Dok	7.320.500	2 Dok	30.525.500		
		03	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	2 Dok	5.000.000	2 Dok	5.000.000	2 Dok	5.500.000	2 Dok	6.050.000	2 Dok	6.655.000	2 Dok	7.320.500	2 Dok	30.525.500		
		04	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dok	6.000.000	2 Dok	6.000.000	2 Dok	6.600.000	2 Dok	7.260.000	2 Dok	7.986.000	2 Dok	8.784.600	2 Dok	36.630.600		
		05	5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	2 Dok	6.000.000	2 Dok	6.000.000	2 Dok	6.600.000	2 Dok	7.260.000	2 Dok	7.986.000	2 Dok	8.784.600	2 Dok	36.630.600		
		06	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	6 Dok	7.000.000	6 Dok	7.000.000	6 Dok	7.700.000	6 Dok	8.470.000	6 Dok	9.317.000	6 Dok	10.248.700	6 Dok	42.735.700		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Pelayanan Publik	01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum	89 Indeks	326.854.669	89,25 Indeks	345.000.000	89,5 Indeks	379.500.000	90 Indeks	417.450.000	90,25 Indeks	459.195.000	90,5 Indeks	505.114.500	90,5 Indeks	2.106.259.500		
		02	1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	92.113.000	3 paket	95.000.000	3 paket	104.500.000	3 paket	114.950.000	3 paket	126.445.000	3 paket	139.089.500	3 paket	579.984.500		
		05	2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-		
		06	3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10 Paket	-	10 Paket	-	10 Paket	-	10 Paket	-	10 Paket	-	10 Paket	-	10 Paket	-		
	09	4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket	234.741.669	12 Paket	250.000.000	12 Paket	275.000.000	12 Paket	302.500.000	12 Paket	332.750.000	12 Paket	366.025.000	12 Paket	1.526.275.000			
	01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum	88 Indeks	6.000.000	89 Indeks	10.500.000	89 Indeks	11.550.000	89 Indeks	12.705.000	90 Indeks	13.975.500	90 Indeks	15.373.050	90 Indeks	64.103.550			
	01	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	6.000.000	1 Lap	10.500.000	1 Lap	11.550.000	1 Lap	12.705.000	1 Lap	13.975.500	1 Lap	15.373.050	1 Lap	64.103.550			

Terwujudnya penataan produk hukum daerah	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi Kebijakan daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat			Indeks Kualitas Kebijakan	75		75		75		76		76		77		77		Biro Hukum	Provinsi Jambi
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	4.01.02	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Persentase Produk Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100 Persen	1.690.800.000	100 Persen	1.500.000.000	100 Persen	1.600.000.000	100 Persen	1.700.000.000	100 Persen	1.800.000.000	100 Persen	1.900.000.000	80 Indeks	8.500.000.000		
				Persentase Permasalahan Hukum yang Difasilitasi	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
				Persentase Capaian Rencana Aksi HAM	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Perundang-undangan Daerah	4.01.02.1.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan		Persentase Penyusunan Produk Hukum yang difasilitasi	100 Persen	867.800.000	100 Persen	770.000.000	100 Persen	830.000.000	100 Persen	910.000.000	100 Persen	980.000.000	100 Persen	1.050.000.000	100 Persen	4.540.000.000		
	01	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum pengaturan yang disusun	60 Dok	229.800.000	50 Dok	200.000.000	50 Dok	220.000.000	50 Dok	250.000.000	50 Dok	270.000.000	50 Dok	300.000.000	50 Dok	1.240.000.000		
	02	2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Penetapan	Jumlah Produk Hukum penetapan yang disusun	600 Dok	135.000.000	610 Dok	120.000.000	600 Dok	130.000.000	610 Dok	150.000.000	610 Dok	160.000.000	610 Dok	170.000.000	610 Dok	730.000.000		
	03	3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum lainnya	Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan dikelola informasi hukumnya	650 Dok	203.000.000	650 Dok	170.000.000	650 Dok	180.000.000	660 Dok	200.000.000	660 Dok	220.000.000	660 Dok	230.000.000	660 Dok	1.000.000.000		
	04	4	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi	90 Dok	300.000.000	90 Dok	280.000.000	90 Dok	300.000.000	90 Dok	310.000.000	90 Dok	330.000.000	90 Dok	350.000.000	90 Dok	1.570.000.000		
Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Hukum	4.01.02.1.02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum		Persentase Permasalahan Hukum dan HAM yang difasilitasi	100 Persen	823.000.000	100 Persen	730.000.000	100 Persen	770.000.000	100 Persen	790.000.000	100 Persen	820.000.000	100 Persen	850.000.000	100 Persen	3.960.000.000		
	01	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	10 kasus	673.000.000	10 kasus	600.000.000	10 kasus	620.000.000	10 kasus	630.000.000	10 kasus	650.000.000	10 kasus	670.000.000	10 kasus	3.170.000.000		
	02	2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah masalah non litigasi dan HAM yang diselesaikan	5 kasus	150.000.000	5 kasus	130.000.000	5 kasus	150.000.000	5 kasus	160.000.000	5 kasus	170.000.000	5 kasus	180.000.000	5 kasus	790.000.000		
						2.057.654.669		1.889.500.000		2.028.450.000		2.171.295.000		2.318.424.500		2.470.266.950		11.344.976.600		
																		Jambi,	2025	
																		PIL. KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI		
																		 M. ALI ZAINI, SH, MH NIP. 19730729 200012 1 002		

REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN																		
KEGIATAN BELANJA DAERAH APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2024																		
POSISI : DESEMBER 2024																		
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI																		
No	Program / Kegiatan	Nama PPTK	Anggaran APBD			Jenis Belanja				Anggaran Belanja	Realisasi Jenis Belanja				Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
			Murni	Perubahan	Setelah Perubahan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer				
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																		
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			34.000.000	0	34.000.000	34.000.000	0	0	0	34.000.000	14.326.400	0	0	0	14.326.400	42,14	92,65	19.673.600
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DHARMA YANTI, SH, MH	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	2.040.000	0	0	0	2.040.000	40,8	90	2.960.000
2	Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	DHARMA YANTI, SH, MH	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	2.340.000	0	0	0	2.340.000	46,8	86	2.660.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	DHARMA YANTI, SH, MH	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	30	100	3.500.000
4	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	DHARMA YANTI, SH, MH	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	3.920.000	0	0	0	3.920.000	65,33	86,67	2.080.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DHARMA YANTI, SH, MH	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	3.200.000	0	0	0	3.200.000	53,33	100	2.800.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DHARMA YANTI, SH, MH	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	1.326.400	0	0	0	1.326.400	18,95	92,86	5.673.600
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah			326.854.669	0	326.854.669	326.854.669	0	0	0	326.854.669	306.730.296	0	0	0	306.730.296	93,84	99,26	20.124.373
1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DHARMA YANTI, SH, MH	92.435.000	0	92.435.000	92.435.000	0	0	0	92.435.000	77.490.000	0	0	0	77.490.000	83,83	97,37	14.945.000
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DHARMA YANTI, SH, MH	234.419.669	0	234.419.669	234.419.669	0	0	0	234.419.669	229.240.296	0	0	0	229.240.296	97,79	100	5.179.373
3. Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	3.720.000	0	0	0	3.720.000	62	90,83	2.280.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DHARMA YANTI, SH, MH	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	3.720.000	0	0	0	3.720.000	62	90,83	2.280.000
II. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM																		
1. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum			867.800.000	0	867.800.000	867.800.000	0	0	0	867.800.000	787.995.643	0	0	0	787.995.643	90,8	96,22	79.804.357
1	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	WILLI CARAMOON, SH, MH	229.800.000	0	229.800.000	229.800.000	0	0	0	229.800.000	183.303.600	0	0	0	183.303.600	79,77	91,38	46.496.400
2	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	ADE YUDHA, SH, MM	135.000.000	0	135.000.000	135.000.000	0	0	0	135.000.000	114.812.203	0	0	0	114.812.203	85,05	96,3	20.187.797
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	ADE YUDHA, SH, MM	203.000.000	0	203.000.000	203.000.000	0	0	0	203.000.000	189.879.840	0	0	0	189.879.840	93,54	96,06	13.120.160
4	Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	ADE YUDHA, SH, MM	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	300.000.000	100	100	0
2. Fasilitas Bantuan Hukum			823.000.000	0	823.000.000	823.000.000	0	0	0	823.000.000	760.753.011	0	0	0	760.753.011	92,44	98,3	62.246.989
1	Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	WILLI CARAMOON, SH, MH	673.000.000	0	673.000.000	673.000.000	0	0	0	673.000.000	672.332.735	0	0	0	672.332.735	99,9	100	667.265
2	Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	WILLI CARAMOON, SH, MH	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	150.000.000	88.420.276	0	0	0	88.420.276	58,95	90,67	61.579.724
TOTAL			2.057.654.669	0	2.057.654.669	2.057.654.669	0	0	0	2.057.654.669	1.873.525.350	0	0	0	1.873.525.350	91,05	97,46	184.129.319
	Keterangan :	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi														
	- Belanja Operasi	2.057.654.669	1.873.525.350	91,05														
	- Belanja Modal	0	0															
	- Belanja Tak terduga	0	0															
	- Belanja Transfer	0	0															
	Jumlah	2.057.654.669	1.873.525.350	91,05														

Lampiran 2

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Triwulan IV Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2024																												
No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun n		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun n		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun n (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun n		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun n (%)		Unit SKPD Penanggung g Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K
1		2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
1	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat	4.01.01.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan	100	persen	440.788.220	100	14.868.000	100	605.802.040	23	30.934.037	25	47.988.004	25	99.454.791	27	394.651.638	100	573.028.470	100	94,59	100	38.426.000	100,00	11	
		4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	scor	440.788.220	B	14.868.000	B	26.500.000	-	-	-	-	-	12.960.000	BB	10.598.000	BB	23.558.000	100	88,90	BB	38.426.000	87,29	11,09	
		4.01.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	16	dokumen	80.587.320	10	-	3	6.000.000	1	-	-	-	1	2.000.000	1	4.000.000	3	6.000.000	100	100	13	6.000.000	81,25	7,45	Biro Hukum
		4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	10	dokumen	67.156.100	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	60,00	-	Biro Hukum	
		4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	10	dokumen	67.156.100	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	60,00	-	Biro Hukum	
		4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	10	dokumen	91.576.500	6	4.440.000	2	7.000.000	1	-	-	-	-	2.960.000	1	3.540.000	2	6.500.000	100	92,86	8	10.940.000	80,00	11,95	Biro Hukum
		4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA	10	dokumen	91.576.500	6	4.950.000	2	7.000.000	-	-	-	-	2	6.400.000	-	-	2	6.400.000	100	91,43	8	11.350.000	80,00	12,39	Biro Hukum
		4.01.01.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	28	laporan	42.735.700	21	5.478.000	5	6.500.000	1	-	1	-	1	1.600.000	2	3.058.000	5	4.658.000	100	71,66	26	10.136.000	162,50	12,58	Biro Hukum
		4.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	persen	1.892.581.000	100	386.911.075	100	569.052.040	20	30.934.037	25	46.388.004	25	84.994.791	30	380.203.638	100	542.520.470	100	95,34	33	929.431.545	63	49,11	
		4.01.01.1.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15	paket	549.459.000	9	84.995.200	3	89.444.700	1	9.977.300	-	9.800.000	1	12.000.000	1	54.622.170	3	86.399.470	100	96,60	12	171.394.670	80,00	31,19	Biro Hukum
		4.01.01.1.06	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10	paket	122.102.000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	30,00	-	Biro Hukum	
		4.01.01.1.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5	paket	122.102.000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	60,00	-	Biro Hukum	
		4.01.01.1.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	laporan	1.089.918.000	36	301.915.875	12	479.607.340	3	20.956.737	3	36.588.004	3	72.994.791	3	325.581.468	12	456.121.000	100	95,10	48	758.036.875	80,00	68,98	Biro Hukum
		4.01.01.1.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa penunjang kantor	100	persen	91.576.500	36	9.553.500	100	10.250.000	25	-	25	1.600.000	25	1.500.000	25	3.850.000	100	6.950.000	100	67,80	48	16.503.500	80	68	
		4.01.01.1.06	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	laporan	91.576.500	36	9.553.500	12	10.250.000	3	-	3	1.600.000	3	1.500.000	3	3.850.000	12	6.950.000	100	67,80	48	16.503.500	80,00	67,80	Biro Hukum
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100,00	87,71			57,45	32,00		
Predikat kinerja																												

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun n		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun n		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun n (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun n		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun n (%)		Unit SKPD Perangkat Jawab									
													I		II		III		IV																			
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16									
5		4	01	05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	100	persen	10.794.000.000	100	2.012.750.225	100	1.350.196.600	23	155.192.159	23	313.189.132	28	599.204.686	27	271.926.730	100	1.339.512.707	100	99,21	7.180	3.352.262.932	108	94									
		4	01	05	1	01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	100	persen	6.652.980.000	100	1.082.195.465	100	595.896.600	20	86.148.172	25	156.232.132	25	215.041.215	30	130.201.930	100	587.623.449	100	98,61	200	1.669.818.914	107,61	24,37								
		4	01	05	1	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	300	dokumen	1.810.000.000	179	291.068.465	60	176.871.000	29	25.060.929	2	-	2	114.485.000	27	35.973.950	60	175.519.879	100	99,24	239	466.588.344	79,67	25,78	Biro Hukum							
		4	01	05	1	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Penetapan	3000	dokumen	1.221.020.000	2100	138.507.250	600	61.875.000	200	14.645.120	400	20.800.000	308	19.051.215	90	6.354.880	998	60.851.215	166	98,35	3.098	199.358.465	103,27	16,33								
		4	01	05	1	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum lainnya	3300	dokumen	1.698.760.000	2600	291.104.400	660	174.624.500	259	22.050.000	404	77.221.500	320	30.410.000	60	39.443.000	1.043	169.124.500	158	96,85	3.643	460.228.900	110,39	27,09								
		4	01	05	1	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	450	dokumen	1.923.200.000	420	361.515.350	90	182.526.100	47	24.392.123	30	58.210.632	20	51.095.000	100	48.430.100	197	182.127.855	219	99,78	617	543.643.205	137,11	28,27								
		4	01	05	1	02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Persentase penyelesaian kasus hukum dan HAM Provinsi Jambi	100	persen	4.141.020.000	100	930.554.760	100	754.300.000	25	69.043.987	20	156.957.000	30	384.163.471	25	141.724.800	100	751.889.258	100	99,68	54	1.682.444.018	64,00	40,63	Biro Hukum							
		4	01	05	1	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	50	kasus	2.920.000.000	34	752.529.860	10	643.710.000	3	22.783.832	2	156.957.000	2	330.884.221	3	131.724.800	10	642.349.853	100	99,79	44	1.394.879.713	88,00	47,77								
		4	01	05	1	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	25	kasus	1.221.020.000	5	178.024.900	5	110.590.000	1	46.260.155	-	-	2	53.279.250	2	10.000.000	5	109.539.405	100	99,05	10	287.564.305	40,00	23,55								
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100,00	99,42					65,80	67,10										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												1.955.986.640	Predikat kinerja								1.912.541.177																	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					100,00	93,57					71,63	49,55										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																																						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan																																						
Faktor penghambat : Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*):																																						
*) diisi oleh Kepala Bappeda																																						
KETERANGAN:												Januari, Februari 2025								Disusun																		
PREDIKAT KINERJA												Dievaluasi								PIL: KEPALA BIRO HUKUM																		
ST : Sangat Tinggi (												KEPALA BAPPEDA																										
T : Tinggi (												PROVINSI JAMBI																										
R : Rendah (																																						
SR : Sangat Rendah (																																						
												(Ir. AGUS SUNARYO, M.Si)								(M. ALI ZAINI, SH, MH.)																		
												Pangkat (Gol/Ruang)								PEMBINA UTAMA MUDA																		
												NIP.								NIP. 19730927 200012 1 002																		

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)																
BIRO HUKUM PROVINSI JAMBI																
TAHUN 2026																

	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum	100 persen	345.000.000		-	3 - Tata Kelola Pemerintahan	-	100 persen	379.500.000	
	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	95.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 - Tata Kelola Pemerintahan	-	3 Paket	104.500.000	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 - Tata Kelola Pemerintahan	-	12 Laporan	275.000.000	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum	100 persen	10.500.000,00		-	3 - Tata Kelola Pemerintahan	-	100 persen	11.550.000	
	4	01	01	1.08	0001	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 - Tata Kelola Pemerintahan	-	12 Laporan	11.550.000	BIRO HUKUM
2	4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100 persen	1.500.000.000					100 persen	1.650.000.000	
	4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100 persen	770.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	100 persen	847.000.000	
	4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum										
							Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	50 Dokumen	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	50 Dokumen	220.000.000	BIRO HUKUM

	4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum										
							Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	600 Dokumen	120.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	600 Dokumen	132.000.000	BIRO HUKUM
	4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya										
							Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	650 Dokumen	170.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	650 Dokumen	187.000.000	BIRO HUKUM
	4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota										
							Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	90 Dokumen	280.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	90 Dokumen	803.000.000	BIRO HUKUM
	4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase penyelesaian permasalahan hukum dan HAM Provinsi Jambi yang difasilitasi Persentase Pembinaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Persentase capaian Rencana Aksi HAM	100 persen	730.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	100 persen	803.000.000	
	4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum										
							Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	600.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	10 Kasus	660.000.000	BIRO HUKUM
	4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM										
							Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	130000000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	5 Kasus	143.000.000	BIRO HUKUM
							J U M L A H		1.889.500.000						2.078.450.000,00	